

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

International Labour Organization (ILO) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Organisasi Perburuhan Internasional merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada upaya mendorong terciptanya peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif yang adil, bebas, aman dan bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. ILO didirikan pada tahun 1919, dan merupakan bagian dari Perjanjian Versailles pada akhir Perang Dunia I. Pendirian ILO ini berdasar pada pemikiran bahwa perdamaian universal hanya dapat dicapai apabila perdamaian tersebut berdasar pada keadilan sosial. ILO berdiri di atas komitmen untuk mempromosikan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi penderitaan, kemiskinan, dan ketidakadilan.¹ Pada tahun 1944, ILO menyatakan berbagai tujuannya itu dengan menetapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan dengan tegas bahwa pekerja tidak boleh disamakan dengan komoditas. Selibhnya, dalam Deklarasi Philadelphia ditetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi bagi para pekerja dengan berdasarkan kepada prinsip “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana.” Dengan deklarasi tersebut ILO hadir dengan tujuan utama untuk mempromosikan hak-hak pekerja dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menjadi masalah kolektif negara anggota. Selibhnya ILO juga bertujuan

¹ “Sekilas Tentang ILO,” *International Labor Organization* (2007).

untuk mendorong terbentuknya peluang kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.²

Seiring dengan perjalanannya, banyak negara yang percaya terhadap visi dan misi dari ILO dan memutuskan untuk bergabung. Setelah Perang Dunia ke-II, terjadi peningkatan jumlah yang besar dalam keanggotaan ILO dan hal tersebut membawa banyak perubahan. ILO meluncurkan program-program yang berfokus pada peningkatan keahlian serta asistensi terhadap pemerintah, pengusaha, dan pekerja di berbagai negara, terkhususnya di negara berkembang.³

Banyak program yang dicanangkan oleh ILO difokuskan untuk negara-negara berkembang. Hal ini bukanlah tanpa alasan, faktanya pada negara-negara berkembang yang dihadapkan dengan isu ketersediaan lapangan kerja serta diskriminasi dalam lingkungan kerja. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, terutama bagi pencari kerja di negara berkembang. Negara berkembang cenderung memiliki masalah dalam menyeimbangkan tingkat ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan pekerjaan juga berhubungan dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa kebijakan yang benar, akan sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan tanpa lapangan pekerjaan yang cukup, tingkat pengangguran akan bertambah serta kemiskinan pun tak terelakkan.⁴

² Ibid.

³ "History of the ILO," *Internasional Labor Organization*, modifikasi terakhir 2019, diakses pada 5 April, 2022, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>.

⁴ "5 Challenges for Employment in Developing Countries," diakses pada 15 Agustus, 2022, <https://www.afd.fr/en/actualites/5-challenges-employment-developing-countries>.

Selain dari pada itu, negara berkembang juga dihadapkan dengan isu kondisi kerja. Masih banyak terdapat pekerja yang bekerja dalam kondisi kerja yang buruk. Sebagai contohnya, masih banyak pekerja yang bekerja tanpa prosedur keselamatan yang memadai, mendapat upah yang di bawah standar upah minimum, serta bekerja tanpa batas waktu yang jelas. Tanpa prosedur keselamatan yang memadai, pekerja bisa saja mengalami kecelakaan kerja yang membuat mereka tidak dapat lagi bekerja. Bekerja dengan upah yang sangat sedikit juga akan membuat pekerja sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut data dari ILO, pada tahun 2017 terdapat 300 juta pekerja di negara berkembang yang memiliki pendapatan per hari kurang dari 1,90 Dolar AS atau kurang dari Rp 28.000 – para pekerja ini akan kemudian disebut *the working poor/the working poverty*.⁵ Kondisi bekerja yang buruk dapat mengakibatkan para pekerja tersebut terjebak dalam kemiskinan. Ditambah lagi, progres pengurangan tingkat *working poverty* di negara berkembang dinilai sangat lambat dan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh ILO.⁶ Maka dari itu, ILO melihat bahwa penting untuk mengadakan program serta pembinaan di negara-negara berkembang.

Salah satu negara berkembang yang menjadi anggota ILO adalah Indonesia. Indonesia bergabung sebagai anggota ke-16 ILO pada 11 Juni 1950. Kerja sama Indonesia dan ILO melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Kerja sama ini juga melibatkan tiga serikat pekerja di Indonesia yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

⁵ “World Employment and Social Outlook – Trends 2018 – Executive Summary,” *International Labor Organization* (2018).

⁶ *Ibid.*

(KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).⁷ Kerja sama antara Indonesia dan ILO ini memprioritaskan tiga masalah penting di Indonesia yaitu penciptaan lapangan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan sosial.⁸ Pemerintah Indonesia dan ILO sepakat untuk mewujudkan program kerja layak di Indonesia (*Decent Work Country Programme/DWCP*). Kerja sama dengan unsur tripartit – melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja – ini mengukung program kesempatan kerja, perlindungan sosial, dialog sosial, dan hak-hak di tempat kerja. Kerja sama penciptaan lapangan kerja juga dilakukan dengan berbagai program kewirausahaan dan program pelatihan ketenagakerjaan untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi perempuan dan laki-laki muda yang memasuki dunia kerja, serta pengoptimalan hasil ketenagakerjaan. Salah satu prioritas dari *Decent Work Country Program* ini adalah peningkatan kerja layak untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁹

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 22,58% dari total seluruh penduduk NTT, dan pada tahun 2021 tingkat

⁷ Hendrik Muhid, “11 Juni 1950 Indonesia Gabung Organisasi Buruh Internasional ILO, Ini Alasannya - Nasional Tempo.Co,” *Tempo.Co*, last modified 2021, diakses pada 25 Februari, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1471358/11-juni-1950-indonesia-gabung-organisasi-buruh-internasional-ilo-inialasannya/full&view=ok>.

⁸ Siprianus Hardum, “Kerja Sama Dengan Indonesia, ILO Prioritaskan 3 Hal Penting,” *Berita Satu*, last modified November 18, 2014, diakses pada 25 Februari, 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/225951/kerja-sama-dengan-indonesia-ilo-prioritaskan-3-hal-penting>.

⁹ Ibid.

kemiskinan di NTT hanya menurun ke angka 20,44%.¹⁰ Tingginya tingkat kemiskinan di NTT ini membuat NTT berada pada peringkat ke-3 provinsi termiskin di Indonesia.¹¹ Kondisi inilah yang membuat NTT menjadi provinsi yang diprioritaskan dalam program *Decent Work Country Program* yang diselenggarakan melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan ILO. Pada provinsi NTT, ILO menjalankan proyek *Decent Work for Food Security and Sustainable Rural Development (DW4FS)* pada empat kabupaten yaitu Belu, Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Timur, yang mana proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, dan memperluas kesempatan berwirausaha di bidang agrikultur – terutama jagung, rumput laut, dan ternak – dengan daya serap pekerja dan pendapatan yang tinggi.¹²

Dengan mempertimbangkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa ILO sebagai salah satu organisasi internasional berpotensi memberikan kontribusi kepada negara anggota dengan mengejar hasil kolektif yang ditargetkan bersama. Namun demikian, penulis melihat urgensi untuk meneliti sejauh mana organisasi Internasional berkontribusi melalui analisis kontribusi ILO terhadap Indonesia

¹⁰ “Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat,” *Komisi XI*, modifikasi terakhir 23 Februari, 2022, diakses pada 25 Februari, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37765/t/Komisi+XI+Soroti+Tingkat+Kemiskinan+di+NTT>.

¹¹ Lidya Sembiring, “Pengumuman! Ini 10 Daerah Termiskin Di Indonesia,” *CNBC Indonesia*, modifikasi terakhir 16 Februari, 2021, diakses pada 25 Februari, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210216084314-4-223576/pengumuman-ini-10-daerah-termiskin-di-indonesia>.

¹² “Decent Work for Food Security and Sustainable Rural Development (DW4FS),” *Internasional Labor Organization*, last modified June 2, 2014, diakses pada 26 Februari, 2022, https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_308006/lang--en/index.htm.

sebagai negara anggota dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil studi kasus program DW4FS di Kabupaten Kupang dengan menimbang Kabupaten Kupang sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi kedua dari empat kabupaten sasaran ILO¹³ dan ketersediaan data yang paling lengkap dibanding dengan tiga kabupaten sasaran ILO lainnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul “Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur Dan Kontribusi Internasional Labour Organization Dalam Pengentasannya: Studi Kasus Program Decent Work For Food Security And Sustainable Rural Development Di Kabupaten Kupang”

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ILO berkontribusi terhadap pengentasan masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program DW4FS di Kabupaten Kupang?
2. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh ILO selama implementasi program DW4FS di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih jelas kontribusi ILO sebagai organisasi internasional terhadap pemberantasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program DW4FS yang kemudian dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya peran organisasi internasional

¹³“BPS Provinsi NTT,” diakses pada 31 Oktober 2022, <https://ntt.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.

dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan. Selibhnya peneliti ingin mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh ILO selama menjalankan program DW4FS di NTT.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerja sama antara pemerintah dan organisasi internasional serta keuntungan yang didapat dari kerja sama tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang isu kemiskinan di NTT serta peran ILO dalam membantu mengurangi kemiskinan di NTT melalui program DW4FS. Selibhnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak lain dalam proses penyusunan penelitian selanjutnya yang berkorelasi dengan topik penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bagian dalam sistematika penulisan penelitian ini. Bagian-bagian tersebut antara lain

BAB I : Bagian ini memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian ini menjelaskan mengenai ILO sebagai organisasi internasional yang mewujudnyatakan visi dan misinya melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Dalam bagian ini, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian.

BAB II : Pada bagian ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan akan membantu penulis dalam memetakan kerangka pemikiran penulis. Tinjauan pustaka kemudian diikuti oleh

penjelasan menyangkut konsep dan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Bagian ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang penulis gunakan. Didalamnya terdapat pendekatan penelitian, metodologi penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Metodologi penelitian ini ditentukan guna memberikan panduan selama melakukan penelitian.

BAB IV : Pada bagian ini penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada BAB II. Penulis akan menguraikan kontribusi yang telah dilakukan ILO selama melakukan program DW4FS di Kabupaten Kupang, NTT, dan tantangan apa yang dihadapi oleh ILO dalam mengimplementasikan program tersebut.

BAB V : Dalam bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan penulis mengenai topik yang dibahas dan juga penulis akan memberikan saran menyangkut pendapat penulis tentang bagaimana sebuah negara dapat memaksimalkan keuntungan dari kerja sama dengan organisasi internasional.